

ISSN 1907-4913

# TElaah manajeMEN

## JURNAL RISET & KONSEP MANAJEMEN

Vol. 7, No. 1

Mei 2012

<b>Benedicta Evienia P. Marsiana Luciana</b>	<b>Niat Melakukan Word Of Mouth Positif oleh Guru sebagai Opinion Leader Siswa SMU Kelas XII berdasarkan Experiential Marketing dari Sebuah Perguruan Tinggi X (PT. X) di Bandung</b>
<b>Farid Bintoro Aji Edi Abdurachman</b>	<b>Analisis Tingkat Implementasi Sistem Informasi Manajemen, Kinerja Pelayanan, dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Tangerang (Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata Kota Tangerang)</b>
<b>Jimmy Sadeli Eddy Budianto Lew Naik Henokh Parmenas</b>	<b>Membangun Strategi Employer Branding Kelompok Usaha Bina Nusantara</b>
<b>Maria Angeline Hartanto L. Jade Faliany</b>	<b>Pengaruh Merger atau Akuisisi terhadap Kinerja Keuangan dan Harga Saham Perusahaan Publik</b>
<b>Theresia Marchella Septyani Anna Purwaningsih</b>	<b>Pengaruh Kompetensi Komite Audit dan Keberadaan Komite Kebijakan Corporate Governance terhadap Financial Distress (Studi Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)</b>
<b>Yohanes Arianto B. Nugroho</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Berfokus pada Proses, Kompetensi, dan Talenta: Sebuah Pemikiran dan Kajian pada Pengembangan Human Capital di Perguruan Tinggi</b>



# TElaah manaje MEN

## JURNAL RISET & KONSEP MANAJEMEN

Vol. 7, No. 1

Mei 2012

### DAFTAR ISI

**NIAT MELAKUKAN *WORD OF MOUTH* POSITIF OLEH GURU SEBAGAI *OPINION LEADER* SISWA SMU KELAS XII BERDASARKAN *EXPERIENTIAL MARKETING* DARI SEBUAH PERGURUAN TINGGI X (PT. X) DI BANDUNG**

Benedicta Evienia Prabawanti, Marsiana Luciana

1-18

**ANALISIS TINGKAT IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, KINERJA PELAYANAN, DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KOTA TANGERANG (STUDI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN PARIWISATA KOTA TANGERANG)**

Farid Bintoro Aji, Edi Abdurachman

19-30

**MEMBANGUN STRATEGI *EMPLOYER BRANDING* KELOMPOK USAHA BINA NUSANTARA**

Jimmy Sadeli, Eddy Budianto Lew, Naik Henokh P.

31-42

**PENGARUH MERGER ATAU AKUISISI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN HARGA SAHAM PERUSAHAAN PUBLIK**

Maria Angeline Hartanto, L. Jade Faliany

43-57

**PENGARUH KOMPETENSI KOMITE AUDIT DAN KEBERADAAN KOMITE KEBIJAKAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* (STUDI PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)**

Theresia Marchella Septyani, Anna Purwaningsih

58-74

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERFOKUS PADA PROSES, KOMPETENSI, DAN TALENTA: SEBUAH PEMIKIRAN DAN KAJIAN PADA PENGEMBANGAN *HUMAN CAPITAL* DI PERGURUAN TINGGI**

Yohanes Arianto Budi Nugroho

75-87

**PENGARUH KOMPETENSI KOMITE AUDIT DAN KEBERADAAN KOMITE  
KEBIJAKAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*  
(STUDI PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA)**

Theresia Marchella Septyani  
(Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta)  
theresiamarchella89@gmail.com

Anna Purwaningsih  
(Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta)  
annapurwaningsih1977@gmail.com

**ABSTRACT**

This research aims at finding out the impact of the audit committee's competence and the impact of the corporate governance policy committee's existence on financial distress of the banking institutions listed at the Indonesia Stock Exchange in the years of 2006-2010. The variable of the audit committee's competence is measured based on the committee's educational background and their job resume in accounting and finance; the variable of corporate governance policy committee is measured with its existence; and, the variable of *financial distress* is measured with the proxy of *interest coverage ratio*. Logistic regression is used to test the hypothesis. The result shows that audit committee's competence influences negatively on the condition of *financial distress*; meanwhile, corporate government policy committee's existence does not influence the condition of financial distress.

**Keywords:** audit committee, *corporate governance* policy committee, *financial distress*, Indonesian banking

**1. PENDAHULUAN**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang "*highly regulated*" (Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, 2004).

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir tahun 1997, kehidupan dunia perbankan mengalami keterpurukan yang sangat tajam. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya bank yang telah dilikuidasi (dibubarkan). Hal ini menunjukkan bahwa fundamental industri perbankan Indonesia belum kuat. Perbankan akan dimonitor oleh nasabah dan para investornya, khususnya terhadap pengelolaan modal yang dimiliki. Oleh karena itu, bank seharusnya menyediakan informasi yang memadai mengenai kondisi keuangan dan kegiatan operasional yang dicantumkan dalam laporan keuangan.

Dalam teori keagenan, terjadi pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Anggarini, 2010). Pemilik memberikan wewenang pengelolaan kekayaan perusahaan kepada manajemen dengan harapan memperoleh tambahan kekayaan dan



kemakmuran. Di sisi lain, pihak manajemen pun memiliki harapan memperoleh tambahan kesejahteraan dengan memaksimalkan kompensasi. Perbedaan kepentingan yang ada memungkinkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Para manajer dapat mengambil keputusan dengan tidak memikirkan kepentingan pemilik/investor, sebaliknya kontrol yang besar dari pemilik memungkinkan pemilik melakukan tindakan yang memiliki risiko tinggi yang berakibat bank mengalami kesulitan keuangan/*financial distress* pada saat terjadi guncangan pada lingkungan makro ekonomi (Swandari, 2008). *Financial distress* terjadi dapat disebabkan oleh adanya serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya pengawasan kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan (Brigham dan Daves, 2003 dalam Anggarini, 2010). *Financial distress* pada perbankan membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

*Financial distress* merupakan suatu kondisi kesulitan keuangan perusahaan yang dapat dibaca sebagai sinyal-sinyal suatu kebangkrutan dalam sebuah perusahaan (www.afaanz.org, diakses 02 Oktober 2011). Penelitian terdahulu berbeda-beda dalam mengartikan *financial distress*. Perbedaan ini tergantung pada cara pengukuran *financial distress*. Almilia dan Kristijadi (2003) dalam Anggarini (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah perusahaan yang selama beberapa tahun mengalami laba bersih operasi (*net operation income*) negatif dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran deviden. Hill *et al.* (1996) dalam Anggarini (2010) menyatakan *financial distress* dilihat dengan adanya pemberhentian tenaga kerja atau tidak adanya pembayaran deviden, sedangkan dalam penelitian ini definisi perbankan yang mengalami *financial distress* mengacu pada penelitian Wardhani (2006), yaitu perbankan yang mempunyai *interest coverage ratio* kurang dari 1 (satu).

*Interest coverage ratio* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga utang yang dimiliki perusahaan. Hal ini mengindikasikan berapa kali beban bunga dapat dilunasi dari ketersediaan laba yang dimiliki perusahaan (Investopedia, di akses 20 Oktober 2011). Jika jumlah laba yang diperoleh perusahaan kurang dari jumlah beban bunga utang yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan berada dalam kondisi *financial distress* (Claessens *et al.*, 1999 dalam Anggarini, 2010).

Kondisi *financial distress* dalam perusahaan perbankan dapat diminimalisasi dengan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG). Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. *Corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya terkait dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (*Forum Corporate Governance in Indonesia*, 2002 dalam Anggarini, 2010). Sehubungan dengan GCG, komite audit dan komite kebijakan *corporate governance* merupakan bagian dari mekanisme GCG dalam melakukan pengendalian internal (Anggarini, 2010).

Bapepam melalui keputusan Ketua Bapepam, yaitu Kep-41/PM/2003 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional



yang independen atas proses penyusunan pelaporan dan penjelasannya untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, salah satu atau lebih anggota komite audit diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menganalisis laporan keuangan (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Anggarini, 2010). Dengan kompetensi yang dimiliki komite audit untuk melakukan pemeriksaan dan analisis informasi keuangan, diharapkan hasil analisis komite audit dapat menangkap sinyal-sinyal penurunan kondisi keuangan atau *financial distress*. Rahmat *et al.* (2008) dalam Anggarini (2010) menemukan bahwa kesulitan keuangan secara signifikan berhubungan dengan keahlian komite audit di bidang keuangan. Anggarini (2010) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh kompetensi komite audit terhadap *financial distress*. Hasil yang sama sebelumnya ditemukan oleh Raghunandan (1996) dalam Anggarini (2010), bahwa komite audit dengan kompetensi baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami *financial distress*.

Selain komite audit, keberadaan komite kebijakan *corporate governance* membantu dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Komite kebijakan *corporate governance* dapat digabung dengan komite nominasi dan remunerasi. Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi serta sistem remunerasinya (Pedoman GCG di Negara anggota ACMF, 2010).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ndoen (2011), keberadaan komite kebijakan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini *going concern*. Menurut Setiawan (2006) dalam Santosa dan Wedari (2007), *going concern* dinyatakan sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya secara langsung yang akan mempengaruhi laporan keuangan. Jadi, jika laporan keuangan disusun dengan dasar *going concern* berarti diasumsikan perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang. Opini *going concern* merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang berlawanan dengan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas tersebut dimungkinkan mengalami masalah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh keberadaan komite kebijakan *corporate governance* terhadap penerimaan opini *going concern* tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak dilaksanakannya pedoman umum GCG Indonesia yang mensyaratkan adanya komite kebijakan *corporate governance* dalam perusahaan (Ndoen, 2011).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai karakteristik GCG terhadap kondisi *financial distress*, Nur (2007) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada perusahaan yang termasuk dalam LQ45, eksistensi komite audit pun berpengaruh negatif dengan kondisi *financial distress* pada kasus yang terjadi di Australia tahun 1999-2003 ([www.afaanz.org](http://www.afaanz.org), diakses 02 Oktober 2011). Magdalena (2009) juga menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menguji kembali pengaruh kompetensi komite audit terhadap kondisi *financial distress* sesuai penelitian Anggarini (2010). Namun, penelitian ini menambahkan variabel keberadaan komite kebijakan *corporate governance* pada perbankan *go public* di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian Anggarini (2010) yang menemukan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* pada sektor perbankan. Selain itu,



penelitian ini dapat menunjukkan adanya pengaruh keberadaan komite kebijakan *corporate governance* terhadap kondisi *financial distress*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh kompetensi komite audit dan keberadaan komite kebijakan *corporate governance* terhadap terjadinya kondisi *financial distress* perbankan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (a) Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap terjadinya kondisi kesulitan keuangan/*financial distress* perbankan?; (b) Apakah keberadaan komite kebijakan *corporate governance* berpengaruh terhadap terjadinya kondisi kesulitan keuangan/*financial distress* perbankan?

Sementara itu, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi komite audit dan komite kebijakan *corporate governance* terhadap terjadinya kondisi kesulitan keuangan/*financial distress* perbankan. Dengan informasi tersebut, diharapkan perbankan Indonesia dapat memutuskan perlu tidaknya keberadaan kedua komite tersebut untuk mencegah risiko terjadinya *financial distress*.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) dalam Anggarini (2010) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara *principal* yang menggunakan *agent* untuk melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan *principal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Agar hubungan kontraktual dapat berjalan lancar, maka *principal* akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada *agent*. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dengan mana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan.

*Agent* atau para manajer yang bertindak sebagai pengelola kekayaan *principal* atau investor/pemilik, memiliki kewenangan dalam berbagai pengambilan keputusan yang ada dalam perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, dapat saja para manajer tidak memperhatikan kepentingan pemilik untuk mendapatkan pengembalian atau tambahan kekayaan atas investasi. Hal ini dapat terjadi karena adanya konflik kepentingan dengan mana para manajer juga memiliki kepentingan untuk menambah jumlah kompensasi yang diterimanya.

Tanpa prosedur pengawasan yang efektif, manajemen puncak perusahaan selalu tergoda untuk menyimpang dari kepentingan pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983 dalam Anggarini, 2010). Jika penyimpangan yang dilakukan para manajer perusahaan terjadi terus-menerus tanpa ada pengawasan dari pihak independen ataupun pemilik/investor maka bukan tidak mungkin kondisi keuangan perusahaan suatu saat akan mengalami kesulitan keuangan atau sering disebut dengan *financial distress*.

*Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah para investor investasikan (Andayani, 2010). Beberapa mekanisme *corporate governance* adalah komite audit dan komite kebijakan *corporate governance*.

Keputusan Ketua Bapepam, Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Kompetensi yang cukup baik dalam menganalisis informasi keuangan perusahaan dapat membantu anggota komite audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menganalisis dan



menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, sehingga komite audit diharapkan dapat mengetahui terlebih dahulu jika kondisi keuangan perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*.

Komite kebijakan *corporate governance* pun memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan GCG serta menjamin bahwa praktik-praktik GCG telah dilaksanakan secara efektif, sehingga diharapkan perusahaan yang melaksanakan GCG secara efektif dapat mengurangi risiko terjadinya kondisi *financial distress* di dalam perusahaan.

### **Financial Distress**

*Financial distress* adalah suatu kondisi kesulitan keuangan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai sinyal-sinyal adanya risiko kebangkrutan sebuah perusahaan. *Financial distress* dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya (Brigham dan Daves, 2003 dalam Anonim, [www.afaanz.org](http://www.afaanz.org), diakses 02 Oktober 2011).

*Financial distress* memiliki banyak arti. Dari penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan dalam mengartikan *financial distress*, dengan mana perbedaan ini tergantung pada cara pengukuran *financial distress*. Elloumi dan Gueyie (2001) mengkategorikan perusahaan dengan *financial distress* bila selama dua tahun berturut-turut mengalami laba bersih negatif (Anggarini, 2010). Classens *et al.* (1999) mendefinisikan perusahaan yang berada dalam *financial distress* sebagai perusahaan yang memiliki *interest coverage ratio* kurang dari satu (Wardhani, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Hofer (1980) dan Whitaker (1999) mendefinisikan *financial distress* sebagai suatu kondisi perusahaan mengalami laba bersih (*net income*) negatif selama beberapa tahun (Luciana, 2006), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Luciana (2004) mendefinisikan kondisi *financial distress* sebagai suatu kondisi dimana perusahaan mengalami *delisted* akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-turut serta perusahaan tersebut telah di *merger* (Luciana, 2006).

*Financial distress* dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan (Damodaran, 1997 dalam Anggarini, 2010). Faktor internal meliputi kesulitan arus kas, jumlah utang yang besar, dan kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun. Sementara itu, faktor eksternal antara lain adalah kondisi ekonomi makro seperti suku bunga.

### **Good Corporate Governance**

*Corporate governance* berkaitan dengan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi (Nur, 2007). Prinsip-prinsip GCG menurut OECD (2004) dalam Andayani (2010) adalah sebagai berikut:

1. *Fairness* (keadilan); menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. *Transparency* (transparansi); mewajibkan adanya suatu sistem informasi terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.



3. *Accountability* (akuntabilitas); menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.
4. *Responsibility* (pertanggungjawaban); memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Beberapa mekanisme *corporate governance* adalah adanya komite audit dan komite kebijakan *corporate governance*. Keputusan Ketua Bapepam, Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite kebijakan *corporate governance* pun memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan *good corporate governance* serta menjamin bahwa praktik-praktik GCG telah dilaksanakan secara efektif.

#### **Kompetensi Komite Audit**

Komite audit diatur dalam Kep-305/BEJ/07-2004 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki komite audit. Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/pbi/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum, anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi, dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian perbankan atau hukum.

Anggota komite audit harus mampu dan mengerti serta menganalisis laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh perusahaan. Kompetensi komite audit diwujudkan oleh keahlian akuntansi, keuangan, perbankan, dan hukum yang dimiliki anggota komite.

#### **Keberadaan Komite Kebijakan *Corporate Governance***

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, keberadaan komite kebijakan *corporate governance* dalam perusahaan cukup vital karena memiliki fungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh. Anggota komite kebijakan *corporate governance* terdiri dari anggota dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan, namun bila dipandang perlu, komite kebijakan *corporate governance* dapat digabung dengan komite nominasi dan remunerasi.

#### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu menguji tentang kompetensi komite audit dan komite kebijakan *corporate governance* serta pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress* antara lain adalah penelitian Anggarini (2010) yang menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan non-perbankan. Karakteristik komite audit yang digunakan adalah ukuran, independensi, frekuensi pertemuan, dan kompetensi komite audit. Penelitian tersebut menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa hanya kompetensi komite audit dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap *financial distress*, sedangkan ukuran, independensi, dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Magdalena (2009) menganalisis praktik *corporate governance* terhadap kesulitan keuangan pada perusahaan LQ45. *Financial distress* pada penelitian tersebut ditandai dengan EPS negatif (-)



dan ROE negatif (-). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan EPS, komite audit tidak berpengaruh terhadap kesulitan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial dan institusional, ukuran dewan direksi, serta komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan. Selanjutnya berdasarkan ROE, hanya ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kesulitan keuangan sedangkan kepemilikan manajerial, institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap kesulitan keuangan.

Nur (2007) menganalisis pengaruh praktik GCG terhadap kesulitan keuangan pada perusahaan LQ45. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan manajerial dan institusional, ukuran dewan direksi, komisaris independen, serta komite audit. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kepemilikan manajerial dan institusional, ukuran dewan direksi, dan komisaris independen memiliki hubungan negatif terhadap kesulitan keuangan. Variabel komite audit tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kesulitan keuangan.

Selanjutnya, penelitian mengenai *corporate governance and financial distress evidence from Australia* tahun 1999-2003 (Anonim, [www.afaanz.org](http://www.afaanz.org), diakses 02 Oktober 2011) membuktikan bahwa ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, eksistensi komite audit, dan *CEO duality* berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun komposisi dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

### Pengembangan Hipotesis

#### Kompetensi Audit dengan *Financial Distress*

Komite audit diatur dalam Kep-305/BEJ/07-2004 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki komite audit. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/pbi/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum, anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang komisaris independen, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi, dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian perbankan atau hukum.

Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Anggarini, 2010).

Dengan kompetensi yang dimiliki komite audit untuk melakukan pemeriksaan dan analisis informasi keuangan, diharapkan komite audit dapat menangkap sinyal-sinyal *financial distress*. Hal ini sejalan dengan penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) yang membuktikan bahwa komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Anggarini (2010) juga menemukan adanya pengaruh kompetensi komite audit terhadap *financial distress*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>a1</sub>: Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

#### Keberadaan Komite Kebijakan *Corporate Governance* dengan *Financial Distress*

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, komite kebijakan *corporate governance* bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya,



termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta menjamin bahwa praktik-praktik tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Keberadaan komite kebijakan *corporate governance* dalam memantau secara berkala pelaksanaan *corporate governance* dapat membantu mengurangi terjadinya konflik kepentingan sehingga mempertahankan kondisi keuangan perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ndoen (2011), keberadaan komite kebijakan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini *going concern*. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh keberadaan komite kebijakan *corporate governance* terhadap penerimaan opini *going concern* tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak dilaksanakannya pedoman umum GCG Indonesia yang memberikan syarat adanya komite kebijakan *corporate governance* dalam perusahaan (Ndoen, 2011).

*Going concern* dinyatakan sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan (Setiawan, 2005 dalam Santosa dan Wedari, 2007). Dengan demikian, jika laporan keuangan disusun dengan dasar *going concern* maka dapat diasumsikan perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang. Opini *going concern* merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan sehingga jika perusahaan mengalami kondisi yang berlawanan dengan asumsi kelangsungan usaha, maka perusahaan tersebut dimungkinkan mengalami masalah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Pada umumnya, informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup perusahaan berhubungan dengan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Ramadhany, 2004). McKeown *et al.* (1991) dalam Ramadhany (2004) menyatakan bahwa auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini *going concern* pada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Hal ini diperkuat oleh Geiger *et al.* (1996) dalam Ramadhany (2004) yang menemukan bukti terjadi peningkatan pergantian auditor yang mengeluarkan opini *going concern* pada perusahaan *financial distress*, serta Krishnan dan Krishnan (1996) dalam Ramadhany (2004) yang menemukan bahwa auditor cenderung mengeluarkan opini *going concern* ketika kemungkinan perusahaan berada dalam *financial distress* naik 28% dengan model probit Zmijewzki (1984).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>2</sub>: Keberadaan komite kebijakan *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel dengan beberapa kriteria tertentu. Kriteria sampel tersebut meliputi hal-hal berikut:

- a. Bank Umum Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Laporan keuangan disajikan dalam rupiah. Jika disajikan dalam mata uang lain, penggunaan kurs mata uang tersebut dapat berubah-ubah setiap hari terhadap mata uang rupiah.
- c. Laporan keuangan tahunan dapat diperoleh secara lengkap periode tahun 2006-2010.
- d. Laporan GCG dapat diperoleh secara lengkap periode tahun 2006-2010.



## Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Secara lengkap, operasionalisasi variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel**

KONSEP	DIMENSI	ELEMEN
<i>Financial Distress</i> ( <i>Interest coverage ratio</i> )	Perbankan yang mengalami <i>financial distress</i> memiliki skor 1 (satu) Perbankan yang tidak mengalami <i>financial distress</i> memiliki skor 0 (nol)	Nominal
Kompetensi Komite Audit	Terdapat satu anggota komite audit yang memiliki kompetensi = 0 (nol) Terdapat dua anggota komite audit yang memiliki kompetensi = 1 (satu) dan seterusnya	Ordinal
Keberadaan komite kebijakan <i>corporate governance</i>	Terdapat komite kebijakan <i>corporate governance</i> = 1 (satu) Tidak terdapat komite kebijakan <i>corporate governance</i> = 0 (nol)	Nominal

Sumber: Claessens *et al.* (1999) dan Putra (2010) dalam Anggarini (2010)

### Variabel Dependen: *Financial Distress* (FD)

Variabel *financial distress* pada penelitian ini menggunakan proksi *interest coverage ratio* (ICR). *Interest coverage ratio* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga hutang yang dimiliki perusahaan. Hal ini mengindikasikan berapa kali beban bunga dapat dilunasi dari ketersediaan laba yang dimiliki perusahaan (Investopedia, di akses 20 Oktober 2011).

Perusahaan yang mendapatkan jumlah laba melebihi jumlah beban hutang yang dimiliki dapat terhindar dari kondisi kesulitan keuangan. Sebaliknya, jika jumlah laba yang diperoleh perusahaan kurang dari jumlah beban bunga hutang yang dimiliki perusahaan, maka inilah yang dinamakan perusahaan dalam kondisi *financial distress*. Dengan kata lain, jika jumlah ICR kurang dari 1 (satu) maka perusahaan berada dalam kondisi *financial distress* (Claessens *et al.*, 1999 dalam Anggarini, 2010). Jika kondisi ini terjadi terus-menerus dan tidak ada pengambilan keputusan untuk menanggulangi kondisi tersebut maka bukan tidak mungkin kondisi keuangan perusahaan semakin menurun hingga terjadi kebangkrutan.

Variabel *financial distress* merupakan variabel *dummy*, yaitu perbankan yang mengalami *financial distress* diberi skor 1 (satu), sedangkan perbankan yang tidak mengalami *financial distress* diberi skor 0 (nol).

Formula *interest coverage ratio*:

$$ICR = \text{Operating Profit} / \text{Interest Expense}$$

Keterangan :

ICR : *Interest coverage ratio*  
Operating Profit : Laba Operasi  
Interest expense : Beban Bunga



### **Variabel Independen 1: Kompetensi Komite Audit (Komp\_KA)**

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/pbi/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum, anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi, dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian perbankan atau hukum.

Kompetensi komite audit dalam penelitian ini merupakan variabel dengan skala ordinal, yaitu memiliki skor klasifikasi dan order (ada urutannya). Pemberian skor pada variabel ini adalah 0 (nol) jika terdapat satu anggota komite audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang keuangan, 1 (satu) jika terdapat dua orang anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang keuangan, dan seterusnya. Apabila anggota komite audit hanya memiliki salah satu dari latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang keuangan, maka tidak termasuk anggota yang memiliki kompetensi yang disyaratkan sehingga skor adalah nol (Putra, 2010 dalam Anggarini, 2010).

Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomi bergelar sarjana muda, sarjana, *magister*, dan doktor dari universitas dalam negeri maupun luar negeri atau pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan *non-formal* yang berkaitan dengan kompetensi keuangan dan administrasi bisnis. Pengalaman di bidang keuangan dapat dilihat pada profil anggota komite audit yang sedang atau pernah bekerja dalam bidang audit, perbankan, *finance*, menjadi akademisi akuntansi pada universitas dalam negeri atau luar negeri, dan menjabat sebagai anggota komite audit maupun *internal control* pada perusahaan lain (Anggarini, 2010).

### **Variabel Independen 2: Keberadaan Komite Kebijakan *Corporate Governance* (KCG)**

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, perusahaan wajib memiliki komite kebijakan *corporate governance*, namun menurut Kep-305/BEJ/07-2004, perusahaan hanya diwajibkan memiliki komite audit. Bank Indonesia pun tidak mewajibkan perbankan memiliki komite kebijakan *corporate governance*.

Keberadaan komite kebijakan *corporate governance* membantu dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya. Keberadaan komite kebijakan *corporate governance* dalam memantau secara berkala pelaksanaan *corporate governance* dapat membantu mengurangi terjadinya konflik kepentingan menurut teori keagenan sehingga mempertahankan kondisi keuangan perusahaan.

Komite kebijakan *corporate governance* dapat digabung dengan komite nominasi dan remunerasi. Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi serta sistem remunerasinya (Pedoman GCG di Negara anggota ACMF, 2010).

Keberadaan komite kebijakan *corporate governance* diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dengan mana skor 1 (satu) jika dalam perusahaan perbankan terdapat komite kebijakan *corporate governance* dan skor 0 (nol) jika dalam perusahaan perbankan tidak terdapat komite kebijakan *corporate governance*. Jika fungsi komite kebijakan *corporate governance* dilakukan oleh komite nominasi dan remunerasi, dalam hal ini komite kebijakan *corporate governance* digabung dengan komite nominasi dan remunerasi, maka diberi skor 1 (satu).

### **Pengujian Hipotesis**

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan disajikan statistik deskriptif atas data untuk menunjukkan gambaran perusahaan sampel. Selanjutnya, pengujian hipotesis dalam



penelitian ini menggunakan regresi logit (*regression logistic*). Model regresi logit digunakan untuk mencari persamaan regresi jika variabel dependennya merupakan variabel yang berbentuk skala nominal atau ordinal (Santosa dan Ashari, 2005).

*Logistic regression* tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model. Artinya, variabel penjelas tidak harus terdistribusi normal. Hal ini disebabkan karena teknik estimasi variabel dependen yang melandasi *logistic regression* adalah *maximum likelihood* bukan asumsi *Ordinary Least Square* (OLS) seperti yang biasa digunakan dalam analisis regresi (Kuncoro, 2001).

Variabel dependen yang digunakan merupakan variabel *binary*, yaitu apakah perbankan tersebut mengalami *financial distress* atau tidak. Variabel independen yang digunakan dalam model ini adalah ukuran kompetensi komite audit dan keberadaan komite kebijakan *corporate governance*.

Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi logit dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS. Persamaan yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$FD = \alpha + \beta_1 \text{Komp\_KA} + \beta_2 \text{KCG} + e$$

Keterangan:

FD = Skor 1 (satu) untuk perbankan yang mengalami *financial distress*, skor 0 (nol) untuk perbankan yang tidak mengalami *financial distress*.

$\alpha$  = konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = koefisien regresi

e = *error terms*

Pada model regresi logistik, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dari *output* model tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah uji kelayakan model (*Goodness of Fit Test*), uji keseluruhan model (*overall model fit*), dan *classification table*.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 22 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu tahun 2006-2010. Secara terinci proses pemilihan sampel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Proses Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-2010	32
2.	Penyajian laporan keuangan tidak menggunakan satuan rupiah	(0)
3.	Perusahaan perbankan yang tidak menyajikan laporan tahunan lengkap periode tahun 2006-2010	(9)
4.	Perusahaan perbankan yang tidak menyajikan laporan GCG secara lengkap periode tahun 2006-2010	(1)
<b>Jumlah Sampel</b>		<b>22</b>
<b>Total sampel selama periode penelitian (5 tahun)</b>		<b>110</b>

Sumber: Data penelitian diolah



## Statistik Deskriptif

Sampel penelitian sebanyak 22 perusahaan pada rentang tahun pengamatan tahun 2006–2010. Dengan demikian diperoleh data 110 perusahaan perbankan, yaitu 6 perbankan yang mengalami kondisi *financial distress* dan 104 perbankan yang tidak mengalami kondisi *financial distress*. Statistik deskriptif perbankan yang diteliti secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Berdasarkan data pada Tabel 3, perusahaan perbankan yang mengalami *financial distress* berjumlah 6 perusahaan dalam kurun 5 tahun (2006–2010). Hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap kompetensi komite audit pada perbankan yang mengalami kondisi *financial distress* menunjukkan minimum 1 dan maksimum 2, dengan rata-rata kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit sebesar 1,83.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif Perbankan Mengalami *Financial Distress***

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KOMP_KA	6	1	2	1.83	.408
KCG	6	0	0	.00	.000
Valid N (listwise)	6				

Sumber: Data penelitian diolah

Berdasarkan data pada Tabel 4, perusahaan perbankan yang tidak mengalami *financial distress* berjumlah 104 perusahaan dalam kurun 5 tahun (2006–2010). Hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap kompetensi komite audit pada perbankan yang tidak mengalami kondisi *financial distress* menunjukkan minimum 0 dan maksimum 6, dengan rata-rata kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit sebesar 2,59. Hasil ini menunjukkan tingginya tingkat kompetensi komite audit perusahaan perbankan yang tidak mengalami kondisi *financial distress* dibandingkan dengan perbankan yang mengalami kondisi *financial distress*.

**Tabel 4. Statistik Deskriptif Perbankan Tidak Mengalami *Financial Distress***

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KOMP_KA	104	0	6	2.59	1.355
KCG	104	0	1	.28	.451
Valid N (listwise)	104				

Sumber: Data penelitian diolah

Persentase perusahaan yang memiliki komite kebijakan *corporate governance* sebesar 28% dari populasi perusahaan perbankan yang tidak mengalami *financial distress*, sedangkan perusahaan perbankan yang mengalami *financial distress* tidak memiliki komite kebijakan *corporate governance*. Fakta ini menunjukkan masih minimnya keberadaan komite kebijakan *corporate governance* dalam industri perbankan.



### Pengujian Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

*Goodness of fit test* dapat dilakukan dengan memperhatikan *output Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit test* (Ghozali, 2005). Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* sebesar 0,978 dan lebih besar dari 0,05 maka berarti tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model mampu memprediksi nilai observasinya atau model *fit* dengan data.

**Tabel 5. Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	.791	5	.978

Sumber: Data penelitian diolah

### Pengujian Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

*Overall Model Fit* bertujuan untuk menilai apakah model yang digunakan telah sesuai dengan data observasi. Di dalam *Overall Model Fit*, terdapat beberapa ukuran yang dapat digunakan. Ukuran-ukuran tersebut adalah  $-2 \text{ Log Likelihood}_1$ ,  $-2 \text{ Log Likelihood}_2$ , *cox and snell's R*<sup>2</sup>, *nagelkerke's R*<sup>2</sup>, serta *classification table*. Ukuran-ukuran beserta hasil pengukuran *Overall Model Fit* dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Overall Model Fit**

Ukuran	Hasil
$-2 \text{ Log Likelihood}_1$	46,571
$-2 \text{ Log Likelihood}_2$	31,480
<i>Cox and Snell's R</i> <sup>2</sup>	0,128
<i>Nagelkerke's R</i> <sup>2</sup>	0,371
<i>Classification table</i>	94,5%

Sumber: Data penelitian diolah

Nilai pada  $-2 \text{ Log Likelihood}$  dalam analisis logit mirip dengan *the sum of squared error* dalam analisis regresi. Hasil SPSS memberikan dua nilai  $-2 \text{ Log Likelihood}$ , untuk model pertama yang hanya memasukkan konstanta sebesar 46,571. Nilai  $-2 \text{ Log Likelihood}$  kedua untuk model dengan konstanta dan variabel independen sebesar 31,480. Dari kedua nilai  $-2 \text{ Log Likelihood}$  dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sebesar 15,091 yang berarti penambahan variabel independen berupa kompetensi komite audit dan keberadaan komite kebijakan *corporate governance* dapat memperbaiki model.

*Cox and Snell's R Square* dan *Nagelkerke's R Square*, merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada *multiple regression*. Nilai *R Square* terletak antara 0 dan 1. Nilai *R Square* yang kecil (mendekati 0) menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Pada *output SPSS* nilai *Cox and Snell's R*



sebesar 0,128 dan nilai *Nagelkerke's R<sup>2</sup>* adalah 0,371 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 37,1%.

### Classification Table

*Classification table* merupakan tabel yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kecocokan sebuah model yang diperhatikan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan jumlah data yang diobservasi dengan hasil prediksi. Hasil SPSS menunjukkan bahwa kebenaran klasifikasi berdasarkan model sebesar 94,5%.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Hasil Pengujian Regresi Logistik**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Keterangan
Komp_KA	-,253	,084	8,966	1	,003	,777	Signifikan
KCG	-15,461	7162,185	,000	1	,998	,000	Tidak Signifikan
Constant	2,520	1,505	2,804	1	,094	12,433	

Sumber: Data penelitian diolah

Dengan demikian model regresi logistik penelitian ini adalah:

$$FD = 2,520 - 0,253Komp\_KA - 15,461KCG$$

Pengujian hipotesis 1 bertujuan untuk menguji apakah kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel kompetensi komite audit mempunyai *p-value* 0,003 dan koefisien variabel sebesar -0,253. *P-value* lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  berarti hipotesis diterima. Dengan demikian, kompetensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*.

Pengujian hipotesis 2 bertujuan untuk menguji apakah keberadaan komite kebijakan *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel komite kebijakan *corporate governance* menghasilkan *p-value* 0,998 dan koefisien variabel sebesar -15,461. Komite kebijakan *corporate governance* memiliki *p-value* lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , berarti hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite kebijakan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

### Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Semakin besar anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anggarini (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini sejalan pula dengan penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) yang membuktikan bahwa komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami *financial distress*.



Peran komite audit adalah mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh komite audit membutuhkan kompetensi (kualifikasi keahlian akuntansi dan keuangan) yang baik. Hasil ini dapat menjelaskan bahwa komite audit dengan anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang lebih tinggi dan lebih sesuai akan secara nyata mampu mengontrol kondisi operasional dan keuangan perusahaan sejak dini. Komite audit yang kompeten akan mampu melakukan koreksi terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat dijadikan acuan oleh manajemen untuk melakukan perbaikan hingga akhir periode keuangan tahunan (Anggarini, 2010).

Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan komite kebijakan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Tidak adanya pengaruh komite kebijakan *corporate governance* terhadap *financial distress* kemungkinan karena pengawasan terhadap pelaksanaan *corporate governance* dalam perusahaan pada umumnya dilakukan langsung oleh dewan komisaris (Ndoen, 2011). Selain itu, meskipun pedoman umum *good corporate governance* mensyaratkan adanya komite kebijakan *corporate governance* bagi perusahaan yang menerapkan GCG, namun BEI berdasarkan peraturan Kep-305/BEJ/07-2004 tidak mewajibkan adanya komite kebijakan *corporate governance* dalam perusahaan *go public*. Terlebih lagi, Bank Indonesia dengan peraturan nomor 8/4/pbi/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum tidak mewajibkan perusahaan perbankan untuk membuat komite kebijakan *corporate governance* sesuai pedoman umum *good corporate governance* Indonesia. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa perusahaan perbankan *go public* akan lebih tunduk terhadap aturan BEI dan BI, sebagai badan otoritas.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh keberadaan kompetensi komite audit serta komite kebijakan *corporate governance* terhadap kemungkinan perusahaan perbankan mengalami *financial distress*. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- Kompetensi komite audit, yang diproksikan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan, berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress* pada perusahaan perbankan.
- Keberadaan komite kebijakan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu beberapa perusahaan perbankan tidak mempublikasikan laporan GCG dengan lengkap pada laporan tahunan perbankan sehingga memperkecil jumlah sampel yang diambil.

### Saran

Penelitian selanjutnya dapat memasukkan faktor-faktor lain dari *corporate governance* yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data lain yang diperoleh langsung dari emiten dan atau dari Ikatan Komite Audit Indonesia sehingga sampel akan lebih banyak sehingga model akan lebih bagus.



## DAFTAR RUJUKAN

- Andayani, Tutut Dwi. 2010. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba. *Tesis*. Semarang: Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.
- Anggarini, Tifani Vota. 2010. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress. Fakultas Ekonomi. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.
- Anonim. 2011. Corporate Governance and Financial Distress: Evidence from Australia. <http://www.afaanz.org> [02 Oktober 2011].
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta. Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- Keputusan Ketua BAPEPAM. Kep-41/PM/2003 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Magdalena, Desy. 2009. *Analisis Praktik Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Terhadap Kesulitan Keuangan Perusahaan (Financial Distress) Studi Kasus Perusahaan Lq-45 Periode 2004-2006 Pada Bursa Efek Indonesia*. <http://eprints.undip.ac.id>. [23 September 2011].
- Mc Mullen, Dorothy A. & K. Raghunandan. 1996. Enhancing Audit Committee Effectiveness. *Journal Of Accountancy*.
- Ndoen, Renaldi Giovanni. 2011. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Opini Going Concern. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Nur, Emrinaldi. 2007. Analisis Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kesulitan Keuangan Perusahaan. Universitas Riau. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9.
- Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, 2004. <http://muharieffendi.files.wordpress.com>. [02 Oktober 2011].
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. 2006. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/pbi/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Ramadhany, Alexander. 2004. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur yang Mengalami Financial Distress Di Bursa Efek Jakarta. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Santosa, Arga F. & Linda K. Wedari. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern. *JAAI*, Vol.11, No.3: 141-158.
- Santosa, Purbayu Budi & Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Edisi Satu. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Luciana, Spica Almilialia. 2006. Prediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Go Public Dengan Menggunakan Analisis Multinomial Logit. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.



- Swandari, Fifi. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Risiko Dan Implikasinya Terhadap Kesulitan Keuangan Bank Umum Di Indonesia. *Skripsi*. Solo: Fakultas Ekonomi. Universitas Slamet Riyadi.
- Tim Studi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bapepam LK. 2010. Pedoman GCG di Negara anggota ACMF.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- Wardhani, Ratna. 2006. Mekanisme *Corporate Governance* Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms). Di dalam *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang.
- Why Interest Coverage Matters To Investors? 2011.  
<http://www.investopedia.com/articles/basics/04/040804.asp>. [22 Oktober 2011].